



KAJIAN
PAGU INDIKATIF
KEMENTERIAN DAN LEMBAGA

2023

MITRA KERJA KOMISI VI



PUSAT KAJIAN ANGGARAN
BADAN KEAHLIAN SETJEN DPR RI

**KAJIAN PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN DAN LEMBAGA
TAHUN 2023 – MITRA KERJA KOMISI VI**

Pengarah : Dr. Inosentius Samsul, S.H., M.Hum.

Penanggungjawab : Drs. Helmizar, M.E.

Ketua : Robby Alexander Sirait, S.E., M.E.

Wakil Ketua :

Rastri Paramita, S.E., M.M.

Anggota :

Adhi Prasetyo Satriyo Wibowo, S.M., M.A.P.

Ervita Luluk Zahara, S.E., M.E

Rahayuningsih, S.Pd.

Editor :

Satrio Arga Effendi, S.E.

Nadya Ahda, S.E.

Leo Iskandar, S.E

Orlando Raka Bestianta, S.E.

Rahayuningsih, S.Pd

Fadila Puti Lego Geni, S.E., M.M

Pusat Kajian Anggaran

Tahun 2022



Kata Pengantar Kepala Pusat Kajian Anggaran

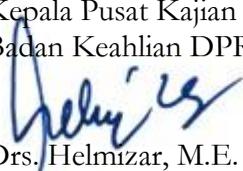
Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, atas terselesainya penyusunan dan penyajian buku “Kajian Pagu Indikatif Kementerian dan Lembaga 2023 Mitra Komisi VI DPR RI” yang disusun oleh Pusat Kajian Anggaran Badan Keahlian Sekretariat Jenderal DPR RI sebagai unsur pendukung keahlian terhadap pelaksanaan Fungsi Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI).

Pada 20 Mei 2022 silam, Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM dan PPKF), beserta Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023. Dengan disampaikannya KEM dan PPKF berserta RKP 2023 tersebut, maka Komisi VI DPR RI akan menjalankan kewajiban pelaksanaan tugasnya di Bidang Anggaran sebagaimana diatur di dalam Pasal 98 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, yakni mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang termasuk dalam ruang lingkup tugasnya bersama-sama dengan Pemerintah. Dalam pembicaraan pendahuluan tersebut, Komisi VI DPR RI akan melakukan pembahasan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerjanya, di mana pagu indikatif dimaksud merupakan ancar-ancar pagu anggaran yang diberikan kepada kementerian/lembaga sebagai pedoman dalam penyusunan rencana kerja (renja) kementerian/lembaga.

Guna memberikan dukungan keahlian terhadap pelaksanaan tugas Komisi VI DPR RI di Bidang Anggaran pada siklus pembicaraan pendahuluan tahun anggaran 2023, Pusat Kajian Anggaran menyusun kajian pagu indikatif kementerian/lembaga yang merupakan mitra kerja Komisi VI DPR RI. Kajian yang tersusun ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi tambahan referensi bagi para Anggota Komisi VI DPR RI dalam pada saat pembahasan dan pengambilan kuputusan pagu indikatif kementerian/lembaga yang menjadi mitra kerja Komisi VI DPR RI.

Kami menyadari bahwa buku ini masih jauh dari komprehensif dan sempurna. Oleh karena itu, berbagai masukan dan kritikan senantiasa kami harapkan guna lebih mempertajam substansi dan isi buku yang akan kami terbitkan di masa mendatang. Akhir kata, semoga buku ini menjadi sesuatu yang bermanfaat bagi Pimpinan dan Anggota Komisi VI DPR RI.

Jakarta, Juni 2022
Kepala Pusat Kajian Anggaran
Badan Keahlian DPR RI



Drs. Helmizar, M.E.
196407191991031001

Daftar isi

Kata Pengantar.....	iii
Pagu Indikatif Kementerian Investasi/Bkpm Tahun 2023.....	1
Pagu Indikatif Badan Perlindungan Konsumen Nasional Tahun 2023.....	5
Pagu Indikatif Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas Dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) Tahun 2023.....	9
Pagu Indikatif Bp Sabang Tahun 2023.....	13
Pagu Indikatif Badan Standardisasi Nasional (BSN) Tahun 2023.....	17
Pagu Indikatif Kementerian Badan Usaha Milik Negara (Kementerian BUMN) Tahun 2023.....	21
Pagu Indikatif Kementerian Perdagangan Tahun 2023.....	27
Pagu Indikatif Kementerian Koperasi Ukm Tahun 2023.....	31
Pagu Indikatif Komisi Pengawas Persaingan Usaha Tahun 2023.....	35



KOMISI VI





PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN INVESTASI/BKPM TAHUN 2023

Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2022, pagu anggaran Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) dialokasikan sebesar Rp711,5 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pelaksanaan kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kinerja realisasi penanaman modal, antara lain: a. Mendorong sektor-sektor prioritas yang memiliki nilai tambah; b. Penyusunan profil peluang investasi dalam bentuk dokumen pra FS pada proyek-proyek strategis dengan daya ungkit tinggi di 34 provinsi; c. Menjadikan Indonesia sebagai destinasi prioritas bagi perusahaan yang akan relokasi; Melaksanakan dan mengawal implementasi Undang-undang Cipta Kerja dan peraturan turunannya; e. Menyelesaikan berbagai permasalahan yang menghambat realisasi proyek-proyek mangkrak; f. Pembentukan satgas percepatan investasi berdasarkan Keputusan Presiden No. 11 Tahun 2021; g. Pelaksanaan promosi investasi yang terfokus berdasarkan sektor dan negara; serta h. Penyederhanaan perizinan berusaha melalui penerapan sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik melalui sistem OSS Berbasis Risiko. Adapun beberapa *output* Prioritas non Prioritas Nasional dapat terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan Prioritas Kementerian Investasi/BKPM

No.	Output Prioritas	2022		Nama Prioritas RKP 2022
		PN	Non PN	
1	Pengadaan Lisensi/ATS yang mendukung OSS	1 Sistem	---	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Pengembangan Data Center dan DRC yang Mendukung OSS	1 Sistem	---	
3	Rencana Aksi peningkatan peringkat EoDB	11 Rekomendasi	---	
4	Validasi perizinan berusaha yang telah diterbitkan oleh OS		15.000 Badan Usaha	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
5	Pengembangan OSS	1 Sistem	---	
6	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Wilayah I	10 Badan Usaha	---	
7	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Wilayah II	10 Badan Usaha	---	
8	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Wilayah III	23 Badan Usaha	---	
9	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Investasi Wilayah IV	12 Badan Usaha	---	

Sumber: Nota Keuangan

Untuk tahun 2023, nilai pagu indikatif Kementerian Investasi/BKPM mengalami penurunan dari menjadi sebesar Rp646 miliar yang terdiri Program Dukungan Manajemen Sebesar Rp314,3 miliar dan Program Penanaman Modal sebesar Rp 331,7 miliar (KEM dan PPKF 2023). Pada dokumen KEM dan PPKF 2023 yang telah disampaikan oleh pemerintah pada 20 Mei 2022, belum terdapat rincian prioritas penggunaan pagu indikatif

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Berangkat dari fokus kegiatan prioritas serta kegiatan tahun 2022, guna pemenuhan target tersebut terdapat 3 (tiga) hal yang menjadi penyebab permasalahan investasi mangkrak di Indonesia, yaitu perizinan di kementerian/lembaga pusat, perizinan di pemerintah daerah, dan permasalahan lapangan terkait lahan. Untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan tersebut maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi adalah sebagai berikut:

- a. Kementerian Investasi/BKPM perlu melakukan kerja sama antara pemerintah baik itu pusat maupun daerah untuk mempermudah investor untuk merealisasikan investasinya
- b. Kementerian Investasi/BKPM selain melakukan promosi juga perlu mengawal iklim investasi di Indonesia mulai dari tahap perizinan, *financial closing*, pembangunan, hingga sampai tahap produksi komersial.

- c. Kementerian Investasi/BKPM selain memfasilitasi investasi dengan nilai besar, perlu juga untuk memberikan fasilitasi terhadap investor menengah dan kecil.
- d. Kementerian Investasi/BKPM perlu meningkatkan jangkauan wilayah kegiatan penerbitan dan pembagian Nomor Induk Berusaha bagi pelaku UMKM perseorangan. Lebih lanjut Kementerian Investasi/BKPM perlu memberikan sosialisasi kemudahan OSS berbasis risiko bagi masyarakat di daerah.
- e. Kementerian Investasi/BKPM perlu memastikan investasi di Indonesia turut mengimplementasikan tingkat penyerapan TKDN yang ketat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- f. Kementerian Investasi/BKPM perlu memastikan setiap investasi yang masuk ke Indonesia wajib memperhatikan pemerataan pembangunan, kesejahteraan masyarakat, memaksimalkan penggunaan tenaga kerja lokal serta alih teknologi.



PAGU INDIKATIF BADAN PERLINDUNGAN KONSUMEN NASIONAL TAHUN 2023

Hasil survei Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) tahun 2020 yang dilakukan Kementerian Perdagangan di 34 provinsi menunjukkan, keberdayaan konsumen nasional berada pada level 49,07 atau berada pada level Mampu, yang artinya konsumen sudah mengenali haknya, menentukan pilihan terbaik, termasuk menggunakan produk dalam negeri, namun belum aktif memperjuangkan haknya. Namun, level tersebut dinilai belum mampu membuat konsumen Indonesia pada tahap berdaya, sebab untuk mewujudkan konsumen yang berdaya, IKK harus berada di level 80-100.

Lebih lanjut 3 dari 7 agenda pembangunan RPJMN sangat erat kaitannya dengan perlindungan konsumen. Prioritas Nasional 1 yaitu “Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas” di mana perlindungan konsumen terwujud melalui pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan. Kemudian Prioritas Nasional 2 yaitu “Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan” terkait dengan perlindungan konsumen harus mampu mendorong pemerataan ekonomi bagi seluruh masyarakat. Selanjutnya Prioritas Nasional 3 yaitu “Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing” di mana Peningkatan daya saing SDM yang berilmu pengetahuan dan berteknologi.

Badan Perlindungan Konsumen Nasional periode 2020-2023 mempunyai sasaran meningkatkan efektivitas perlindungan konsumen melalui 4 indikator yaitu:

Indikator 1 :	Persentase rekomendasi perlindungan konsumen yang dilaksanakan Kementerian dan Lembaga
Sasaran :	Meningkatnya kualitas kajian dan analisis terhadap regulasi dan isu aktual yang disampaikan kepada K/L
Indikator :	Jumlah rekomendasi kepada K/L
Indikator 2 :	Jumlah edukasi dan sosialisasi perlindungan konsumen kepada pemerintah, masyarakat dan pelaku usaha
Sasaran :	Peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada pemerintah, masyarakat, dan pelaku usaha
Indikator :	1. Indeks persepsi/kepuasan publik terhadap informasi perlindungan konsumen 2. Indeks pemahaman atas hak dan kewajiban konsumen dalam dan pemanfaatan barang/jasa
Indikator 3 :	Jumlah pengaduan konsumen yang diselesaikan
Sasaran :	Peningkatan penyelesaian pengaduan konsumen dalam dan luar negeri
Indikator :	Jumlah penanganan pengaduan konsumen
Indikator 4 :	Jumlah kerjasama di bidang perlindungan konsumen baik dalam maupun luar negeri
Sasaran :	Bertambahnya bentuk kerjasama dalam rangka peningkatan perlindungan konsumen dalam dan luar negeri
Indikator :	Jumlah kerjasama di bidang perlindungan konsumen

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Berangkat dari penjabaran sebelumnya, maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi adalah sebagai berikut:

- a. Tersebarinya kewenangan penyelenggaraan dan pemulihan perlindungan konsumen ke berbagai lembaga (K/L, Pemda, BPSK, Yudikatif) sehingga perlindungan terhadap konsumen tidak dapat berjalan secara maksimal. Untuk itu diperlukan penguatan kelembagaan, salah satunya melalui adanya Undang-Undang yang mengintegrasikan Undang-Undang tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana kesimpulan rapat Komisi VI pada 31 Maret 2022.
- b. Kompetensi personil SDM, anggaran BPKN yang belum memadai disertai anggaran masih berada di Kementerian Perdagangan, sehingga ada ketergantungan dan keterbatasan dana bagi BPKN dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu, BPKN perlu mengadakan pelatihan bagi SDM sesuai dengan kebutuhan serta mendorong BPKN agar dapat mempunyai Bagian Anggaran sendiri.
- c. BPKN perlu meningkatkan koordinasi dengan K/L terkait guna mengatasi masih rendahnya pemanfaatan saran dan/atau rekomendasi BPKN terkait kebijakan, pelaksanaan dan pengawasan Perlindungan Konsumen.
- d. Membangun Sistem Penyelesaian Sengketa Nasional (*National Dispute Resolution*) yang melingkupi penyelesaian sengketa secara konvensional maupun *Online Dispute Resolution* (ODR). Hal ini guna memfasilitasi akses

konsumen ke penyelesaian sengketa dan mekanisme ganti rugi. Selain itu, BPKN perlu berkoordinasi agar portal pengaduan konsumen yang tersebar di beberapa K/L dapat terintegrasi.

WELCOME TO BATAM

PAGU INDIKATIF BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM (BP BATAM) TAHUN 2023

Tugas dan fungsi Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) sebagaimana tercantum pada Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2007 jo Peraturan Pemerintah nomor 62 tahun 2019 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam adalah untuk memaksimalkan pelaksanaan pengembangan serta menjamin kegiatan usaha di bidang perekonomian yang meliputi perdagangan, maritim, industri, perhubungan, perbankan, pariwisata, logistik, pengembangan teknologi, energi, Kesehatan dan farmasi, dan bidang-bidang lainnya. Dalam APBN TA 2022, alokasi anggaran Badan Pengusahaan Batam adalah sebesar Rp2.273,3 miliar yang bersumber dari PNPB sebesar Rp2.088,67 miliar (91,88 persen), Rupiah Murni sebesar Rp 40,58 miliar (1,78 persen), PHLN sebesar Rp124 miliar (5,45 persen), dan RMP sebesar Rp20 miliar (0,88 persen). Dari total anggaran sebesar Rp2.273,25 miliar tersebut, sebanyak Rp669,75 miliar (29,46 persen) untuk belanja pegawai, belanja barang dan jasa sebesar Rp459,71 miliar (20,22 persen) dan belanja modal sebesar Rp772,01 miliar (33,96 persen). Anggaran yang bersumber dari rupiah murni (RM) sebesar Rp40,58 miliar (1,78 persen) akan dipakai untuk membiayai lanjutan kegiatan Pembangunan Terminal Kargo Bandara yang merupakan proyek *multiyears* dari tahun 2021. Sedangkan anggaran yang bersumber dari Proyek Pinjaman Dan Hibah Luar Negeri (PHLN) dan rupiah murni pendamping (RMP) sebesar Rp144 miliar akan dipakai untuk melanjutkan proyek pengolahan air limbah di Batam. Adapun program kegiatan yang mendukung Prioritas Nasional tahun 2022 antara lain adalah:

1. Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Fasilitas Pelabuhan Batu Ampar Batam yaitu Pengadaan Alat Bongkar Muat, Penataan *Container Yard* (CY) Dermaga Utara, Penataan Jalan Kawasan Terminal Batu Ampar, Revitalisasi Dermaga Selatan Fase 1 Batu Ampar, dan Revitalisasi *Container Yard* Dermaga Selatan
2. Peningkatan Fasilitas Kesehatan yaitu Pengadaan Peralatan Penanganan Cancer/Radiotherapy
3. Pengembangan Infrastruktur dan Peningkatan Fasilitas Jalan dan Drainase, antara lain Pembangunan Jalan Layang Simpang Sei Ladi Tahap 1, Pembangunan Jalan Yos Sudarso Tahap I dan Penataan Jalan RE. Martadinata Tahap 1
4. Pengembangan Infrastruktur Bandara Hang Nadim yaitu Pembangunan Terminal Kargo Bandara Hang Nadim (Proyek *Multiyears* Tahun Anggaran 2021-2022)
5. Penyusunan Rencana Pengembangan *Maritime City* berupa Studi Kajian Pengembangan Kawasan Berorientasi Transit (TOD) di Pulau Rempang dan Pulau Galang.

Untuk tahun 2023, nilai pagu indikatif BP Batam dialokasikan sebesar Rp1.722,9 miliar yang terdiri Program Dukungan Manajemen sebesar Rp858,2 miliar dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp864,8 miliar (KEM dan PPKF 2023). Namun, belum terdapat data mengenai rincian kedua program tersebut.

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Berdasarkan dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah BP Batam Tahun 2021, masih terdapat beberapa isu dan permasalahan BP Batam yang perlu diatasi dan dapat lebih lanjut dibahas dengan **Komisi VI DPR RI**, antara lain:

1. Realisasi indikator investasi di Batam pada tahun 2021 hanya tercapai 59,52%. Di mana ditargetkan sebesar Rp25 triliun dan realisasinya adalah Rp14,88 triliun. Adapun realisasi investasi tersebut didapat berdasarkan akumulasi nilai investasi luar negeri (PMA) dan investasi dalam negeri (PMDN) di wilayah Batam. Untuk itu, **Komisi**

- VI DPR RI** perlu meminta penjelasan bagaimana upaya BP Batam ke depan dalam meningkatkan kinerja investasi di Batam.
2. Realisasi indikator kinerja pada sasaran strategis Kinerja Pelayanan Perizinan terdiri dari indikator Ketepatan Waktu Penyelesaian Perizinan Lahan (hanya terealisasi 65,03%) dan indikator Ketepatan Waktu Penyelesaian Perizinan Permasukn Barang (teralisasi sebesar 95,48%). Untuk itu, **Komisi VI DPR RI** perlu meminta penjelasan dan komitmen BP Batam dalam meningkatkan kinerja pelayanan perizinan lahan.
 3. Permasalahan kelembagaan. Di mana perlu dilakukan pengaturan yang harmonis antara Pemerintah Pusat, BP Batam dengan Pemko Batam agar pembangunan Kawasan Batam tidak mengalami berbagai kendala. Adapun kendala yang sering dihadapi antara lain **masalah pertanahan, perizinan, pengelolaan, pembiayaan, tata ruang dan lingkungan**, dan lain-lain. Diperlukan kejelasan terhadap kewenangan, khususnya antara kewenangan pusat yang diemban oleh BP Batam dan kewenangan Pemko Batam untuk menghindari adanya tumpang tindih dan konflik yang mungkin terjadi dalam pengelolaan dan pengusahaan kawasan Batam di masa mendatang. Untuk itu, **Komisi VI DPR RI** dan BP Batam perlu membahas lebih lanjut mengenai kendala-kendala tersebut dan agar terwujud sinergi yang baik antara BP Batam, Pemerintah Pusat dan juga Pemko Batam.
 4. Adanya tantangan terkait ketenagakerjaan, di mana pada saat ini tenaga terampil di Batam masih belum mencukupi. Maka perlu disiapkan generasi muda yang terampil untuk mengisi tenaga-tenaga kerja di kawasan Batam, sehingga tenaga terampil tersebut tidak diisi oleh orang luar negeri.

PAGU INDIKATIF BP SABANG TAHUN 2023

Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2022, pagu anggaran Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang dialokasikan sebesar Rp77,5 miliar. Alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk: (1) Pengembangan potensi kawasan melalui penerbitan peraturan dan regulasi yang mendukung iklim investasi; (2) Pengembangan potensi ekonomi wilayah, melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pertanahan di Kawasan Sabang; (3) Pembangunan konektivitas, melalui pengelolaan dan penyelenggaraan pelabuhan laut, bandar udara, dan transportasi darat; (4) Peningkatan iklim investasi dan usaha, melalui pelayanan lalu lintas barang serta pelayanan investasi dan perizinan; (5) Membangun teknologi informasi digital, melalui pembangunan sistem informasi terintegrasi untuk modernisasi layanan berbasis elektronik; (6) Mengoptimalkan dan membangun infrastruktur sarana dan prasarana kawasan; dan (7) Meningkatkan daya saing investasi di Kawasan Sabang. Adapun beberapa *output* prioritas non Prioritas Nasional dapat terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan Prioritas BP Sabang

No.	Output Prioritas	Satuan	Non PN
1	Peningkatan Investasi di Kawasan Pengusahaan (persen)	Kegiatan	25
2	Peningkatan Jasa layanan Kepelabuhanan di Kawasan Pengusahaan (persen)	Daerah	10
3	Total Realisasi Jumlah PNPB Tahunan (miliar)	Orang	5,3
4	Indeks Kepuasan Masyarakat (skala)	Orang	4
5	Persentase Penyelesaian Modernisasi Pengelolaan BLU(persen)	Orang	90

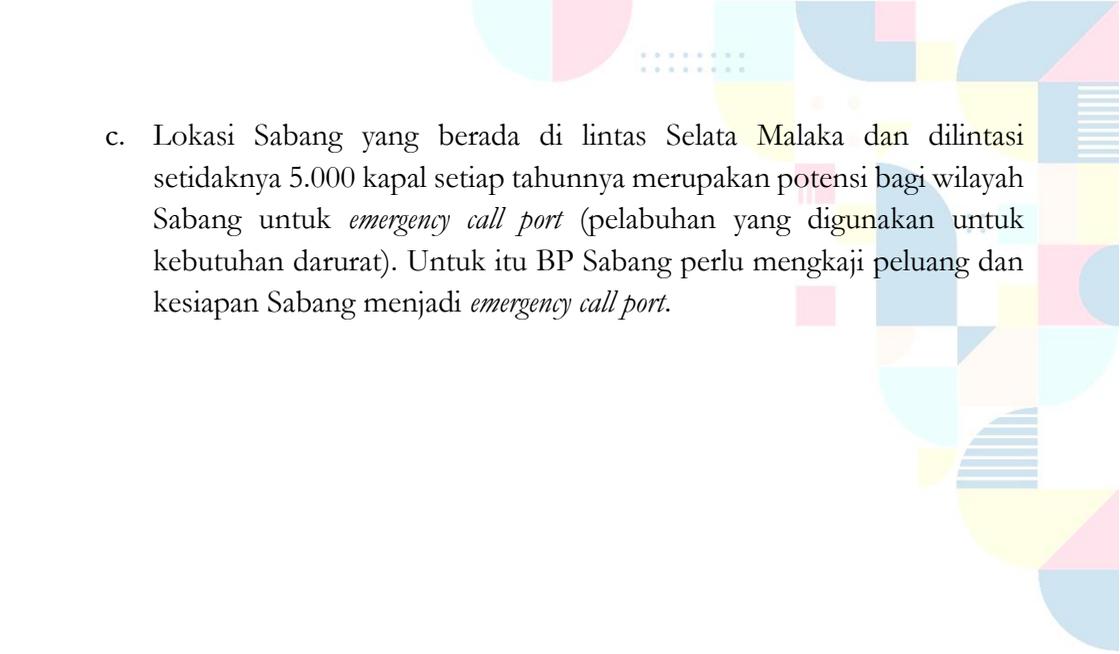
Sumber: Nota Keuangan

Untuk tahun 2023, nilai pagu indikatif BP Sabang mengalami penurunan dari menjadi sebesar Rp66,5 miliar yang terdiri Program Dukungan Manajemen Sebesar Rp40 miliar dan Program Pengembangan Kawasan Strategis sebesar Rp26,6 miliar triliun (KEM dan PPKF 2023). Pada dokumen KEM dan PPKF 2023 yang telah disampaikan oleh pemerintah pada 20 Mei 2022, belum terdapat rincian prioritas penggunaan pagu indikatif. Namun berdasarkan dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, alokasi anggaran tersebut akan diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan dan pemerataan wilayah Sumatera sebagaimana tertuang dalam Program Prioritas (PP) Pembangunan Wilayah Sumatera yang tergabung ke dalam Prioritas Nasional (PN) 2 (Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan).

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Berangkat dari fokus kegiatan prioritas, serta kegiatan guna pemenuhan target Pembangunan Wilayah Sumatera di atas, maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi adalah sebagai berikut:

- a. BP Sabang beserta seluruh *stakeholder* perlu mengoptimal promosi Sabang sebagai destinasi investasi ke dunia internasional guna meraih investasi yang lebih maksimal. Di samping itu infrastruktur pelabuhan Sabang perlu segera diintegrasikan dengan ke pelabuhan lainnya di Indonesia sehingga memudahkan investor ketika hendak menggunakan pelabuhan Sabang sebagai Hub Internasional;
- b. Guna menarik investasi tersebut, BP Sabang perlu memodernisasi pelabuhan sabang, memastikan pengelolaan sarana dan prasarana serta pengelolaan usaha di bidang perdagangan barang dan jasa yang berstandar internasional. Lebih lanjut, dibutuhkan juga perbaikan infrastruktur penunjang investasi, perbaikan pelayanan birokrasi, peningkatan sarana usaha serta diikuti dengan peningkatan kapasitas SDM.

- 
- c. Lokasi Sabang yang berada di lintas Selata Malaka dan dilintasi setidaknya 5.000 kapal setiap tahunnya merupakan potensi bagi wilayah Sabang untuk *emergency call port* (pelabuhan yang digunakan untuk kebutuhan darurat). Untuk itu BP Sabang perlu mengkaji peluang dan kesiapan Sabang menjadi *emergency call port*.



PAGU INDIKATIF BADAN STANDARDISASI NASIONAL (BSN) TAHUN 2023

Badan Standardisasi Nasional (BSN) bertugas menyelenggarakan pemerintahan di bidang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian (SPK) meliputi urusan di bidang pengembangan Standar Nasional Indonesia (SNI) yang berkualitas, penyelenggaraan tata kelola penerapan SNI, pengelolaan sistem akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK), pengelolaan Standar Nasional Satuan Ukuran (SNSU) dan pengelolaan sumber daya manusia di bidang SPK. Dalam APBN TA 2022, alokasi anggaran BSN adalah sebesar Rp219,7 miliar. Pada tahun 2022, BSN melanjutkan kegiatan prioritas dan strategis khususnya bidang SPK, melalui Program Standardisasi Nasional dengan *output* prioritas antara lain:

1. SNI yang ditetapkan sebanyak 454 SNI
2. Bimbingan teknis SPK kepada 200 pelaku usaha
3. Peralatan Laboratorium SNSU sebanyak 10 unit.

Untuk tahun 2023, nilai pagu indikatif BSN pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp198,3 miliar yang terdiri Program Dukungan Manajemen sebesar Rp146,5 miliar dan Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp51,8 miliar (KEM dan PPKF 2023). Namun belum terdapat data mengenai rincian dari kedua program tersebut.

Matriks Ringkasan Capaian dan Target Output Prioritas
Badan Standardisasi Nasional Tahun 2017-2022

No	Output Prioritas dan Satuan Output	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Target		Nama Prioritas Nasional RKP 2022
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1.	SNI yang ditetapkan	539	510	548	466	520	454	-	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2.	LPK yang diakreditasi	1.823	2.019	2.177	2.330	1.791	-	1.844	-
3.	Bimbingan teknis SPK kepada pelaku usaha	109	150	180	237	150	200	-	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
4.	Skema Penerapan SNI	100	75	236	292	116	-	81	-
5.	Peralatan Laboratorium Standar Nasional Satuan Ukuran	-	-	-	-	17	10	-	1. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
6.	Kemampuan pengukuran dan kalibrasi yang diakui di tingkat internasional	-	-	137	131	137	-	143	-
7.	Sertifikat Kalibrasi Standar Nasional Satuan Ukuran	-	-	1.161	1.041	1.077	-	1.099	-

Sumber: NK APBN 2022

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

1. Masih terbatasnya infrastruktur penilaian kesesuaian dalam mendukung penerapan SNI seperti fasilitas uji laboratorium dan lembaga sertifikasi. Selain itu, terdapat tantangan proses akreditasi yang tidak efisien. Berdasarkan laporan BPK pada IHPS II 2021 dijelaskan bahwa terdapat temuan pada proses pemberian status akreditasi kepada 6 LPK pada Direktorat Akreditasi Lembaga Inspeksi dan Lembaga Sertifikasi (ALIS) dan 16 LPK pada Direktorat Akreditasi Laboratorium melebihi satu tahun tidak sesuai dengan ketentuan. Akibatnya, proses akreditasi atas 22 LPK tidak efisien. Kemudian, pada pelaksanaan pelayanan kalibrasi dan pengukuran di Laboratorium SNSU-BSN belum didukung peralatan dan infrastruktur yang memadai, antara lain: (1) peralatan laboratorium kimia tahun 2020 belum dapat dimanfaatkan karena kondisi ruangan memiliki kelembaban yang lebih tinggi dari batas ketentuan ISO/IEC 17025:2017; dan (2) peralatan laboratorium biologi tahun 2021 belum dapat digunakan karena menunggu pengadaan peralatan lainnya. Akibatnya, tujuan pengadaan peralatan Laboratorium SNSU-BSN tahun 2020 dan tahun 2021 untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur Laboratorium SNSU-BSN yang sesuai standar agar mampu menghasilkan pengukuran

di level tertinggi tidak tercapai. Selain itu, terdapat temuan pada pelayanan kalibrasi dan pengukuran pada Laboratorium SNSU-BSN yang belum sepenuhnya dapat melayani kebutuhan industri, antara lain: (1) sebanyak 2 laboratorium SNSU-BSN belum memiliki *Calibration Measurement Capability* (CMC) dari *Bureaud International des Poids et Mesures* (BIPM); dan (2) SNSU-BSN belum memiliki *roadmap* lengkap atas kebutuhan peralatan dan infrastruktur untuk mendukung peningkatan pelayanan kalibrasi dan pengukuran. Akibatnya, pelayanan laboratorium SNSU-BSN belum sepenuhnya optimal dalam meningkatkan daya saing industri di Indonesia. Oleh karena itu, **Komisi VI DPR RI** perlu meminta penjelasan BSN terkait temuan BPK tersebut.

2. Pelaku UMKM masih banyak yang terkendala pada proses sertifikasi SNI. Untuk itu, diperlukan percepatan proses sertifikasi SNI bagi UMKM, terutama bagi pelaku usaha mikro dan kecil sehingga dapat lebih meningkatkan akses pasarnya. Saat ini, pelaku UMKM masih kesulitan dalam memenuhi SNI dan masih melihat penerapan standar saat ini masih dianggap sebagai *cost driver*, bahkan belum memberikan manfaat ekonomi terhadap keuntungan bagi pelaku usaha. Untuk itu, **Komisi VI DPR RI** perlu meminta penjelasan BSN mengenai langkah dan strategi BSN dalam mendukung pelaku UMKM dalam proses pengurusan SNI agar lebih mudah dan terjangkau.
3. Masih sedikitnya informasi dan kurangnya kesadaran pelaku usaha mengenai SNI serta sertifikasi halal. Selain itu, terdapat tantangan masih sedikitnya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang terakreditasi, serta tantangan harmonisasi dan standardisasi sertifikasi halal, baik antarlembaga di Indonesia dan juga antarnegara agar lebih menjamin terpenuhinya hak konsumen akan produk halal. Hal ini bertujuan agar dapat memperjelas model audit lembaga sertifikasi halal serta proses produksi bagi produsen dan pelaku usaha sehingga tidak perlu sertifikasi ulang yang dapat menambah biaya. **Komisi VI DPR RI** perlu meminta penjelasan dan komitmen BSN terkait langkah dan strategi ke depan dalam meningkatkan kualitas LPH dalam mendukung program sertifikasi halal, serta target meningkatnya pelaku usaha yang bersertifikasi halal.

PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA (KEMENTERIAN BUMN) TAHUN 2023

Dalam APBN TA 2022, alokasi anggaran Kementerian BUMN adalah sebesar Rp208,2 miliar, pagu tersebut turun sebesar 15 persen dari APBN tahun 2021. Pada tahun 2022, ada dua kegiatan prioritas Kementerian BUMN yaitu Penguatan Kualitas Keuangan BUMN dan Pengembangan BUMN. Kegiatan Kementerian BUMN Tahun Anggaran 2022 difokuskan untuk mendukung pencapaian target kinerja yang ada pada Rencana Strategis Kementerian BUMN dan Rencana Kerja dengan memperhatikan efisiensi anggaran melalui pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara daring dengan menggunakan teknologi informasi. Kementerian BUMN bukan merupakan kementerian teknis sehingga tidak mendukung secara langsung Prioritas Nasional. Namun demikian, pada RPJMN terdapat empat indikator terkait dengan Kementerian BUMN yaitu:

1. Total *capital expenditure (capex)* BUMN
2. Profit BUMN
3. Peningkatan pasar BUMN ke luar negeri
4. Pembentukan *holding* BUMN

Matriks Ringkasan Target Output Prioritas

Kementerian Badan Usaha Milik Negara Tahun 2017-2022

No.	Output Prioritas dan Satuan Output	2017	2018	2019	2020	2021	2022 Target		Nasib Prioritas Nasional RKP 2022
		Real	Real	Real	Real	Target	PN	Non PN	
1	Total Capex BUMN (Rp Triliun)	315	448	366	255	346	-	577	
2	Net Profit BUMN (Rp Triliun)	186	186	165	29	125	-	224	Target Kinerja pada RPJMN 2020 - 2024 yang terkait langsung dengan Kementerian BUMN
3	Peningkatan Pasar BUMN ke Luar Negeri (Negeri)	-	60	54	55	36	-	42	
4	Pembentukan Holding BUMN (holding)		1	1	1	1	-	2	

Sumber: NK APBN 2022

Untuk tahun 2023, nilai pagu indikatif Kementerian BUMN pada tahun 2023 dialokasikan sebesar Rp232 miliar yang terdiri Program Dukungan Manajemen sebesar Rp175,6 miliar dan Program Pengembangan dan Pengawasan BUMN sebesar Rp56,4 miliar (KEM dan PPKF 2023). Namun belum terdapat data mengenai rincian kedua program tersebut.

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Berdasarkan IHPS II Tahun 2021, secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pendapatan, biaya, dan investasi BUMN mengungkapkan 256 temuan yang memuat 467 permasalahan. Adapun permasalahan tersebut meliputi 219 kelemahan sistem pengendalian intern, 187 ketidakpatuhan, dan 61 permasalahan 3E. Terdapat beberapa permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Perencanaan dan pelaksanaan pekerjaan digitalisasi Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan dan berpotensi merugikan **PT Telkom**, sehingga mengakibatkan PT Telkom kehilangan kesempatan menerima pendapatan sewa digitalisasi SPBU selama tahun 2019 kepada PT Pertamina. Selain itu, terdapat duplikasi penggunaan perangkat *network* SPBU yang mengakibatkan pemborosan keuangan PT Telkom;
2. Permasalahan pada kegiatan operasional hulu migas, yaitu a) permasalahan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaporan pendapatan (**PT Pertamina Hulu Energi Raja Tempirai**) ; b) permasalahan pengelolaan biaya (**PT Pertamina EP**) ; c) permasalahan pengelolaan biaya (**PT Pertamina Hulu Energi Offshore North West Java**); d) permasalahan perencanaan pengelolaan investasi (**PT Pertamina Hulu Indonesia**) ; e) permasalahan pengelolaan investasi (Pelaksanaan akuisisi Maurel & Prom belum sepenuhnya berdasarkan *Good Corporate Governance* **PT Pertamina (Persero)** dan belum sepenuhnya sesuai dengan Pedoman Investasi.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas kegiatan operasional perusahaan dalam pengelolaan hulu migas mengungkapkan 74 temuan

yang memuat 109 permasalahan. Permasalahan tersebut meliputi 43 kelemahan SPI, 40 ketidakpatuhan, dan 26 permasalahan 3E.

3. Pengelolaan pendapatan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), *check-in counter* dan *aviobridge* pada **PT Angkasa Pura II (Persero)** tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga PT AP II tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan yang menjadi piutang; dan
4. Proses pemberian fasilitas kredit pada **PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.** kepada PT OBL belum sesuai dengan ketentuan, serta pemberian fasilitas kredit kepada PT APA belum menerapkan prinsip kehati-hatian.
5. Pengelolaan Proyek *Engineering, Procurement, and Construction* (EPC) pembangunan pembangkit listrik Antam 65 MW pada **PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia (Telkom Infra)** tidak sesuai ketentuan. Di antaranya ialah Telkom Infra belum melakukan *feasibility study* atas proyek, penghentian pekerjaan secara sepihak oleh PT BMJ, dan PT BMJ mengalami gugatan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Akibatnya, Telkom Infra tidak dapat mengeksekusi aset jaminan dan berpotensi mengalami kerugian serta kehilangan margin perusahaan.
6. Pedoman pengadaan barang/jasa di lingkungan **PT AP I** belum sepenuhnya memadai untuk pembangunan infrastruktur bandara baru di Kulon Progo–Yogyakarta, sehingga terdapat indikasi ketidakhematan dan klaim *dispute* terhadap item pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan pada BAST.
7. Pengelolaan pendapatan Pelayanan Jasa Pendaratan, Penempatan, dan Penyimpanan Pesawat Udara (PJP4U), *check-in counter* dan *aviobridge* pada **PT AP II** tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga PT AP II tidak dapat segera memanfaatkan pendapatan yang menjadi piutang.
8. Terdapat kekurangan penerimaan pendapatan sewa aset **PTPN X** dari PT Enero dan potensi kehilangan pendapatan denda atas keterlambatan bayar sewa aset oleh PT Enero.

9. Terdapat kekurangan penerimaan pendapatan sewa aset **PTPN X** dari PT Enero dan potensi kehilangan pendapatan denda atas keterlambatan bayar sewa aset oleh PT Enero.
10. Proses pengadaan masker impor pada **PT RN** belum sepenuhnya mengacu SOP Pengadaan Barang Dagangan dalam Keadaan Darurat, yang mengakibatkan kerugian usaha atas selisih kurs dan kekurangan penerimaan atas pengembalian uang muka dari rekanan.
11. Kegiatan pengelolaan beras komersial pada **Perum Bulog** mengalami kerugian dan membebani keuangan Perum Bulog, serta terdapat biaya movement yang tidak sesuai ketentuan.
12. Proses pemberian fasilitas kredit oleh **BRI** kepada PT OBL belum sesuai dengan ketentuan, seperti proses *take over* kredit PT OBL saat PT OBL dan pemegang saham memiliki kredit dalam kolektibilitas tidak lancar, serta kondisi keuangan PT OBL tahun 2016-2018 dalam kondisi tidak likuid, tidak *solvable*, dan tidak *profitable*. Selain itu, terdapat pemberian fasilitas kredit kepada PT APA belum menerapkan prinsip kehati-hatian. Hal tersebut mengakibatkan pemberian fasilitas kredit berpotensi merugikan keuangan perusahaan serta kepentingan *second way out* BRI kurang terlindungi.

Untuk itu, **Komisi VI DPR RI** perlu meminta Kementerian BUMN untuk segera berkoordinasi dengan BUMN terkait, untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan berdasarkan temuan BPK tersebut dan menyusun langkah dan strategi ke depan. Kementerian BUMN sebagai instansi yang bertugas mengawasi kinerja BUMN perlu meningkatkan pengawasannya secara lebih ketat kepada BUMN. Hal tersebut penting, agar ketika ditemukan tanda-tanda penyimpangan proses bisnis dan penyelewengan lebih cepat teratasi dan meminimalisir kerugian BUMN serta beban keuangan negara.



PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN PERDAGANGAN TAHUN 2023

Dalam APBN TA 2022, alokasi anggaran Kementerian Perdagangan adalah sebesar Rp2.380,1 miliar. Anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung 3 (tiga) agenda pembangunan nasional sebagai berikut: (1) Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (Prioritas Nasional 1); (2) Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing (Prioritas Nasional 3); dan (3) Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan (Prioritas Nasional 4). Sebagai penjabaran dari ketiga Prioritas Nasional tersebut, Kementerian Perdagangan telah menetapkan 6 (enam) sasaran strategis dengan indikator dan target tahun 2022 sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Sasaran Strategi, Indikator dan Target Kemendag 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	TARGET 2022
Mewujudkan Stabilitas Harga dan Ketersediaan Pasokan Bahan Pangan	Inflasi Pangan Bergejolak	3,1 ± 1%
Mewujudkan Konsumen Cerdas dan Pelaku Usaha yang Tertib serta Bertanggung jawab	Indeks Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Indeks 50
Meningkatkan Pasar Produk Dalam Negeri	Pertumbuhan Sub-sektor Perdagangan Besar dan Eceran, bukan Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDB	5,3%
Mengoptimalkan Peranan Perdagangan Berjangka Komoditi, Sistem Resi Gudang, dan Pasar Lelang Komoditas	Pertumbuhan Nilai Transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi	10%
	Pertumbuhan Nilai Resi Gudang yang diterbitkan	9%
	Pertumbuhan Realisasi Nilai Transaksi Pasar Lelang Komoditas	5%
Meningkatnya Pertumbuhan Ekspor Barang Non Migas yang Bernilai Tambah dan Jasa	Neraca Perdagangan USD 10.61 – 11.86 miliar*	USD 10,61 – 11,86 miliar*
	Ekspor Non Migas	7,10 – 7,64%*
	PTA/FTA/CEPA yang disepakati	30 kesepakatan
Meningkatnya Kinerja Kementerian Perdagangan yang Bersih, Akuntabel dan Profesional	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks 80
	Unit Kerja Pelayanan Publik yang Mendapatkan Predikat “Wlayah Bebas dari Korupsi (WLBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)”	2 Unit Kerja
	Nilai Hasil Evaluasi AKIP	Predikat BB
	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan	WTP
	Tingkat Kematangan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Predikat Baik

Sumber: Nota Keuangan 2022

Sebagai upaya mendukung capaian target di atas, Kementerian Perdagangan menyusun 4 *output* prioritas guna mewujudkan Prioritas Nasional pertama sebagaimana tergambar pada tabel 2.

Tabel 2. Target *Output* Prioritas Kemendag 2022

No.	Output Prioritas	2022		Nama Prioritas
		PN	Non PN	RKP 2022
1	Pasar Rakyat yang dibangun/ revitalisasi	84		Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Promosi Produk Potensi Eskpor dalam negeri & Trade Expo Indonesia	6		
3	Promosi Dagang dan Misi Dagang	155	57	
4	Pengawasan Post Border	735		

Sumber: Nota Keuangan 2022

Untuk tahun 2023, nilai pagu indikatif Kementerian Perdagangan mengalami penurunan dari Rp2.380,1 miliar menjadi sebesar Rp2.140,2 miliar yang terdiri Program Dukungan Manajemen sebesar Rp1.274,6 miliar, Program Perdagangan Dalam Negeri sebesar Rp505,4 miliar triliun dan Program Perdagangan Luar Negeri sebesar Rp360,3 miliar (KEM dan PPKF 2023). Pada dokumen KEM dan PPKF 2023 yang telah disampaikan oleh pemerintah pada 20 Mei 2022, belum terdapat rincian prioritas penggunaan pagu indikatif.

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

- 1) Adanya ketidakpastian waktu dalam proses *Service Level Agreement* (SLA). Berdasarkan laporan BPK pada IHPS II 2021 dijelaskan bahwa terdapat temuan pada *Service Level Agreement* (SLA) untuk proses pengajuan perizinan sampai dengan dokumen dinyatakan lengkap belum ditetapkan. Akibatnya, importir atau pemohon perizinan impor tidak dapat memperoleh kepastian tentang jangka waktu dokumen persyaratan yang diajukan telah lengkap. Oleh karena itu, Komisi VI DPR RI perlu mendorong Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk mempertimbangkan merevisi Permendag Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor khususnya terkait dengan penetapan SLA pelayanan perizinan sejak pengajuan permohonan sampai dengan dokumen dinyatakan lengkap.

- 2) Pemrosesan permohonan penerbitan persetujuan impor atas 10 komoditas barang melebihi SLA yang ditetapkan. Akibatnya, importir atau pemohon perizinan impor tidak segera dapat memanfaatkan persetujuan impor sesuai waktu yang direncanakannya serta potensi kepercayaan dan kepuasan importir atau pemohon perizinan berkurang terhadap pelayanan penerbitan persetujuan impor. Oleh karena itu Komisi VI DPR RI perlu meminta Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri untuk menginstruksikan Direktur Impor berkoordinasi dengan Kepala Pusat Data dan Sistem Informasi agar menyempurnakan portal Intrade dengan menambahkan fitur *early warning system* sebagai pengingat bagi pemroses permohonan terkait dengan SLA yang telah ditetapkan.
- 3) Ditengah ketidakpastian situasi global, Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan melalui Dirjen Perdagangan Dalam Negeri, Dirjen Perdagangan Luar Negeri, Dirjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kementerian Perdagangan RI untuk mewujudkan stabilisasi harga dan ketersediaan pasokan bahan pangan guna menjaga inflasi pangan. Selain itu Kementerian Perdagangan perlu merumuskan pengaturan impor dengan mempertimbangkan kepentingan dalam negeri seperti wajib serap komoditi dalam negeri.
- 4) Komisi VI DPR RI meminta Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI) untuk melakukan penguatan regulasi perdagangan digital seperti aset Kripto serta investasi Robot *Trading* yang saat ini memiliki kekosongan regulasi, perlindungan investor/pelanggan aset Kripto dalam bursa fisik aset Kripto dan regulasi tentang penasehat berjangka serta bursa aset Kripto.

PAGU INDIKATIF KEMENTERIAN KOPERASI UKM TAHUN 2023

Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2022, pagu anggaran Kementerian Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Kemkop UKM) dialokasikan sebesar Rp1,4 triliun. Alokasi anggaran tersebut diarahkan untuk peningkatan nilai tambah, daya saing, investasi, ekspor, substitusi impor, dan perluasan lapangan kerja melalui penguatan Kewirausahaan, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), dan Koperasi melalui beberapa kegiatan prioritas (tabel 1).

Tabel 1. Kegiatan Prioritas Kemkop UKM

No.	Output Prioritas	Satuan	2022		Nama Prioritas RKP 2022
			PN	Non PN	
1	Operasional PLUT	Kegiatan	-	1	
2	Pembangunan PLUT	Daerah	-	32	Factory Sharing
3	Pelatihan Kewirausahaan	Orang	-	-	-
4	Pelatihan Perkoperasian	Orang	-	-	-
5	Pelatihan Vocational	Orang	-	-	-
6	Pelatihan bagi Pelaku Koperasi	Orang	3870	-	Penguatan ketahanan Ekonomi (PN1) & Membangun kebudayaan dan karakter bangsa (PN4)
7	Pelatihan bagi Usaha Mikro	UMKM	1860	-	Penguatan ketahanan Ekonomi (PN1)
8	Pelatihan bagi UKM	Orang	9390	-	Penguatan ketahanan Ekonomi (PN1)
9	Pelatihan bagi Wirausaha	Orang	6700	-	PN1 & , PN 4
10	Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro	Pelaku Usaha	-	12800	-
11	Penguatan Rantai Pasok Usaha Mikro	UMKM	500	-	Penguatan ketahanan Ekonomi (PN1)
12	Pengembangan Kawasan dan Rantai Pasok Usaha Kecil dan Menengah	UKM	150	-	Penguatan ketahanan Ekonomi (PN1)
13	Persediaan bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Layanan	1	-	Penguatan ketahanan Ekonomi (PN1)

Sumber: Nota Keuangan

Untuk tahun 2023, nilai pagu indikatif Kemkop UKM mengalami penurunan dari sebesar Rp1,4 triliun menjadi sebesar Rp1,29 triliun yang terdiri Program Dukungan Manajemen sebesar Rp3,98 miliar dan Program Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi sebesar Rp899 miliar triliun (KEM dan PPKF 2023). Pada dokumen KEM dan PPKF 2023 yang telah disampaikan oleh pemerintah pada 20 Mei 2022, belum terdapat rincian prioritas penggunaan pagu indikatif. Namun berdasarkan dokumen Rancangan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2023, alokasi anggaran

tersebut akan diarahkan untuk mencapai beberapa target indikator menguatnya kewirausahaan, UMKM dan Koperasi yang hendak dicapai oleh pemerintah yang merupakan salah satu bagian dari Prioritas Nasional Pertama atau PN 1 sebagaimana termuat dalam tabel 2.

Tabel 2. Indikator Menguatnya Kewirausahaan, UMKM dan Koperasi

Indikator	Baseline	Realisasi			Target	
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Rasio Kredit UMKM Terhadap	19,89	19,67	21,02	20,88	21,44	22
Total Kredit Perbankan (%)	1,71	-7,17	0,08	3	2,74	2,9
Pertumbuhan wirausaha (%)	5,54	6,2	6,2	5,3	5,4	5,5

Sumber: Rancangan RKP 2023, Perpres 115 Tahun 2021, Perpres 120 Tahun 2020

Berbagai target indikator tersebut, salah satunya akan dicapai melalui kegiatan:

1 Digitalisasi usaha;	6 Peningkatan kontribusi UMKM dan koperasi dalam pengadaan barang dan Jasa pemerintah serta BUMN;
2 Akselerasi penerapan kemitraan ;	7 Peningkatan kurasi dan standarisasi produk UMKM, termasuk sertifikasi halal;
3 Pembangunan basis data tunggal UMKM;	8 Penyediaan akses pembiayaan (KUR, UMI, PNM Mekaar, uLaMM dan LPDB KUKM); dan
4 Perbaikan iklim usaha dan peningkatan kapasitas pelaku usaha;	9 Subsidi bunga, restrukturisasi kredit, dan penjaminan kredit bagi pelaku UMKM.
5 Optimalisasi pengelolaan terpadu UMKM berbasis potensi wilayah (fasilitasi ruang produksi bersama);	

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Berangkat dari fokus kegiatan prioritas, serta kegiatan guna pemenuhan target menguatnya kewirausahaan, UMKM dan koperasi diatas, maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi adalah sebagai berikut:

- a. Program pemberdayaan UMKM tersebar di berbagai Kementerian/Lembaga dan belum terintegrasi. Banyaknya jumlah K/L yang melaksanakan pemberdayaan UMKM sudah pasti diiringi dengan berbagai persyaratan. Untuk itu dibutuhkan integrasi program dalam kerangka monitoring dan evaluasi yang nantinya dijadikan rujukan dalam perbaikan berbagai program/kegiatan di masa mendatang.
- b. Koordinasi antara K/L belum berjalan baik, selama ini pelaksanaannya dilakukan oleh masing-masing K/L tanpa terkoordinasi dengan baik dan koordinasi yang dilakukan masih terbatas serta belum dijalankan

- oleh satu lembaga yang memiliki otoritas penuh untuk melaksanakan fungsi koordinasi.
- c. Mayoritas pemberdayaan masih berfokus pada pembiayaan. Kedepan perlu adanya keseimbangan fokus pemberdayaan antara pembiayaan dengan pengembangan SDM. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa masalah fundamental UMKM selain permodalan adalah rendahnya kapasitas SDM dan perluasan pasar.
 - d. Perlu memastikan penyelenggaraan Basis Data Tunggal disertai dengan pemutakhiran data yang secara berkala. Hal ini diperlukan agar pengambilan kebijakan dapat dilakukan tepat sasaran serta tidak menjadi temuan BPK, BPKP maupun KPK sebagaimana program perlindungan sosial.
 - e. Keberhasilan program pemberdayaan dalam jangka pendek dan panjang sangat ditentukan oleh sistem monitoring dan evaluasi yang terukur secara jelas dan komprehensif. Hingga saat ini, belum ada tolak ukur atau kriteria evaluasi yang jelas atas keberhasilan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM. Adapun proses monitoring dan evaluasi dewasa ini dilakukan masing-masing K/L dan evaluasi secara makro dilakukan oleh Bappenas.

PAGU INDIKATIF KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA TAHUN 2023

Berdasarkan Nota Keuangan APBN 2022, pagu anggaran Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dialokasikan sebesar Rp99,7 miliar di mana sebesar 19,49 persen dialokasikan untuk Program Pengawasan Persaingan Usaha dan sebesar 80,51 persen untuk Program Dukungan Manajemen. Anggaran tersebut akan digunakan untuk pengawasan dan penegakan hukum persaingan usaha yang di antaranya adalah; pengawasan persaingan usaha, investigasi dugaan pelanggaran persaingan usaha tidak sehat, penanganan perkara merger dan akuisisi dan pengawasan kemitraan. Adapun beberapa *output* Prioritas Nasional KPPU dapat terlihat pada tabel 1.

Tabel 1. Kegiatan Prioritas KPPU Tahun 2022

No.	Output Prioritas	2022	Nama Prioritas
		PN	RKP 2022
1	Pemantauan dan Kajian Pelaku Usaha	4 Rekomendasi Kebijakan	Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan
2	Analisis Kebijakan Pemerintah	5 Rekomendasi Kebijakan	
3	Advokasi Persaingan Usaha dan Kemitraan	6 Badan Usaha, 3 Lembaga, 3 Forum	
4	Pengawasan kemitraan di daerah	3 Lembaga	
5	Pengawasan Persaingan Usaha di Wilayah Kerja Kantor Wilayah KPPU	6 Rekomendasi Kebijakan	
6	Investigasi Dugaan Pelanggaran Persaingan Usaha Tidak Sehat	21 Perkara	
7	Penindakan Pelanggaran Persaingan Usaha Sehat	8 Perkara	
8	Penilaian Merger dan Akuisisi	1 Perkara, 11 Badan Usaha, 1 Unit	
9	Pengawasan Kemitraan	6 Perkara	
10	Penanganan Perkara Pelanggaran Persaingan Usaha	18 Perkara	

Sumber: Nota Keuangan

Untuk tahun 2023, nilai pagu indikatif KPPU mengalami peningkatan dari sebesar Rp99,7 miliar menjadi Rp100,8 miliar yang terdiri dari Program Dukungan Manajemen sebesar Rp85,4 miliar dan Program Pengawasan Persaingan Usaha sebesar Rp 15,4 miliar (KEM dan PPKF 2023). Pada dokumen KEM dan PPKF 2023 yang telah disampaikan oleh

pemerintah pada 20 Mei 2022, belum terdapat rincian prioritas penggunaan pagu indikatif

BEBERAPA HAL YANG PERLU MENJADI ATENSI PEMBAHASAN

Berangkat dari fokus kegiatan prioritas serta kegiatan tahun 2022 maka terdapat beberapa hal yang perlu menjadi atensi adalah sebagai berikut:

1. Dengan nilai indeks persaingan usaha di Indonesia yang berada di angka 4,81 menunjukkan bahwa kondisi persaingan usaha di Indonesia masih belum ideal. Data tersebut menggambarkan masih banyak tantangan yang dihadapi oleh KPPU. Untuk itu, KPPU perlu terus meningkatkan pengawasan di seluruh sektor.
2. Mulai terkendalinya pandemi Covid-19, diperkirakan pertumbuhan ekonomi akan mulai tumbuh kembali di tahun 2023. Hal tersebut tentunya harus sejalan dengan penegakan hukum yang lebih baik melalui peran 7 (tujuh) Kanwil KPPU di seluruh Indonesia.
3. Sebagai lembaga independen, KPPU perlu memperketat pengawasan terutama dalam hal kemitraan antara pelaku usaha besar dengan UMKM, yang mana sektor ini sangat rentan terjadi praktik-praktik yang kurang sehat antar pelaku usaha.
4. Dalam rangka menjaga stabilitas harga pangan dan bahan pokok di tengah situasi global yang tidak menentu KPPU perlu ikut serta dalam mengawasi keberadaan stok dan distribusi bahan pangan.

